



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Adapun capaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam tahun 2019 berdasarkan indikator dari sisi kecepatan maupun ditindaklanjuti, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik yakni sebesar 97,40%** dimana hal tersebut menandakan bahwa capaian rekomendasi bidang Polhukam hamper seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet baik yang diteruskan maupun yang tidak diteruskan (sesuai isi rekomendasi yang disampaikan). Hal tersebut memperlihatkan bahwa di tahun 2019 kegiatan penyusunan rekomendasi bidang Polhukam yang berkualitas menjadi perhatian utama, kami mengharapkan setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet disetujui untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan strategis oleh Presiden atau Pemerintah.

Sehingga **realisasi rekomendasi bidang Polhukam selama tahun 2019** ini dari 540 rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **526 rekomendasi disetujui** baik yang disampaikan kepada Presiden atau diteruskan kepada Kementerian/Lembaga sebanyak **304 rekomendasi** atau **57,79%** dan sebanyak **222 rekomendasi disetujui** untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Kedeputusan Bidang Polhukam (tidak perlu disampaikan kepada Presiden) atau **42,21%** dan ada **14 rekomendasi** atau **2,6%** (13 rekomendasi IKK 1 dan 1 rekomendasi IKK 3) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang **turun tanpa** catatan/arahan/disposisi kepada Deputy Bidang Polhukam sehingga terhadap ke-14 rekomendasi tersebut disimpulkan **tidak disetujui** oleh Sekretaris Kabinet.



Sebagai gambaran dalam kurun waktu satu tahun **2019**, Deputy Bidang Polhukam telah menyusun rekomendasi sebanyak **540 rekomendasi** (terdiri dari 368 rekomendasi terkait perumusan kebijakan, 38 rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi, dan 134 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat, acara yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden), bila **dibandingkan** dengan tahun **2018** ternyata jumlah rekomendasi mengalami penurunan, dimana di tahun 2018 menghasilkan sebanyak **707 rekomendasi** (terdiri dari 600 rekomendasi terkait rumusan kebijakan, 42 rekomendasi persetujuan prakarsa dan substansi, dan 65 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat terbatas, dan butir wicara, serta arahan Presiden), penurunan jumlah rekomendasi yang dihasilkan tersebut tidak serta merta menandakan bahwa kinerja Deputy Bidang Polhukam di tahun 2019 menurun secara kuantitas dibandingkan tahun 2018. Mengingat selama ini rekomendasi yang dihasilkan adalah berdasarkan usulan berupa berkas/surat yang masuk ditambah beberapa rekomendasi atas inisiatif Kedeputusan Bidang Polhukam dalam rangka melakukan kajian atas isu-isu atau permasalahan yang strategis atau monev Arahan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga di Tahun 2019. Sehingga secara kuantitas besaran rekomendasi yang dihasilkan setiap tahun akan terjadi fluktuasi (naik turun seiring *trend/fokus* kebijakan nasional dari Presiden di tahun tersebut).

Dari sisi anggaran di tahun 2019 Deputy Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sebesar **Rp6.512.959.384,- (enam milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah rupiah)** atau sebesar **99,81%** dari keseluruhan target anggaran sebelum APBN 2019 sebesar Rp.6.525.218.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran sebesar 99,81% adalah yang terbesar dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Deputy Bidang Polhukam Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya.





### **Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Masih belum maksimalnya rekomendasi bidang Polhukam yang **disetujui untuk** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (57,79%) bila dibandingkan dengan rekomendasi yang **disetujui untuk tidak** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (42,21%) di tahun 2019 ini akan dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputy Bidang Polhukam yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten dan harus berorientasi outcome (disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait), meskipun rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk tidak diteruskan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga bukan berarti bahwa rekomendasi tidak berkualitas, mengingat tidak semua permasalahan/usulan yang disampaikan harus disampaikan kepada Presiden karena harus yang strategis dan berdampak nasional yang disampaikan kepada Presiden.

Sedangkan adanya rekomendasi yang turun dari Sekretaris Kabinet yang tidak mendapatkan catatan/arahan/disposisi Sekretaris Kabinet perlu dilakukan **konfirmasi** melalui monitoring secara berkala kepada TU Sekretaris Kabinet apakah benar berkas tersebut benar-benar tidak diterima (terlambat) atau Sekretaris Kabinet memang tidak berkenan memberikan catatan pada berkas dimaksud. Selain hal tersebut tentunya ketepatan substansi dan kecepatan penyampaian (pada moment yang pas/tepat) harus mendapat perhatian bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang Polhukam dalam meningkatkan kualitas rekomendasi yang disampaikan.

Demikian halnya dengan realisasi kegiatan dan anggaran Deputy Bidang Polhukam Tahun 2019 harus ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun yang akan datang dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya serta penguatan sumber daya manusia yang memadai.

Daftar Rekomendasi yang Tidak Disetujui Sekretaris Kabinet Tahun 2019 (Kedeputian Polhukam Pada Tahun 2019)

NO	DARI	JENIS AJUAN	PERIHAL	NOMOR AJUAN WASEKAB/ DEPUTI/SAHLI/ SK	TGL AJUAN	DITERIMA TUP	NO. TUP	MAJU SESKAB	ASSESSMENT CAPAIAN	BUKTI CAPAIAN	ANALISIS	
1	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Bahan Daftar Politik Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	02/01/2019	02/01/2019	5	02/01/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
2	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Laporan rapat pembahasan pelanggaran pesawat militer Singapura di wilayah NKRI	14	14/01/2019	14/01/2019	113	14/01/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
3	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan penetapan peneraian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan (UGNP)	26	21/01/2019	21/01/2019	157	21/01/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
4	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Bahan Untuk Acara Tanggal 30 Maret 2019	156	27/03/2019	27/03/2019	809	27/03/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
5	Deputi Polhukam	Izin Seskab	Penyampaian Usulan Nama Delegasi RI untuk Menghadiri Pertemuan ke-11 AANZFTA Joint Committee and Related Meetings, Tanggal 28 April s.d. 3 Mei 2019 di Melbourne, Australia	169	29/03/2019	29/03/2019	849	29/03/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
6	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media	348	7/12/19	7/12/19	1633	12/07/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
7	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Tindak Lanjut Rencana Pembentukan Badan Peraturan Perundang-undangan (BPUU)	376	7/26/19	7/26/19	1764	26/07/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
8	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Konsep Kelembagaan Kantor Kepresidenan	411	8/15/19	8/16/19	1964	16/08/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
9	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Catatan mengenai kekhususan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	449	04/09/2019	04/09/2019	2135	04/09/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
10	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Laporan Kegiatan dan Permohonan Bantuan Kekurangan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019	502	30/09/2019	30/09/2019	2366	30/09/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
11	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Data Dukung Izin Pembangunan Gedung Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	503	30/09/2019	30/09/2019	2372	30/09/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
12	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan Surat Perintah Perbaikan Bangunan Gedung dan Fasilitas Masyarakat Akibat Kerusakan di Wamena Papua	514	07/10/2019	07/10/2019	2434	07/10/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
13	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Hasil Pemantauan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019	651	30/12/2019	30/12/2019	3281	30/12/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 1
14	Deputi Polhukam	Bahan Rapat	Penyampaian Bahan Substansi Sekretaris Kabinet dalam Menerima Audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Y.M. Joseph R. Donovan Jr. tanggal 8 Januari 2019	9	08/01/2019	08/01/2019	45	08/01/2019	Bukan Output		Bukan Output	IKK 3



Memo Laporan

Daftar Rekomendasi yang Tidak Disetujui Sekretaris Kabinet Tahun 2019 (Kedeputian Polhukam Pada Tahun 2019)																
NO.	DARI	JENIS AJUAN	PERIHAL	NOMOR AJUAN WA SE SKAB/ DEPUTI/SAI BK	TGL AJUAN	DITERIMA TUP	NO. TI	MAJU SESKAI	DARI SESK	DISPOSISI SESKAB	NO. AJUAN SESKAB	DIKIRIM KE, TANGGAL	DITERIMA DARI	KETERANGAN	KE PRESIDEN	NO.
1	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Bahan Daftar Politik Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	02/01/2019	02/01/2019	5	02/01/2019								
2	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Laporan rapat pembahasan pelanggaran pesawat militer Singapura di wilayah NKRI	14	14/01/2019	14/01/2019	113	14/01/2019								
3	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan penetapan penegerian Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan (UGNP)	26	21/01/2019	21/01/2019	157	21/01/2019								
4	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Bahan Untuk Acara Tanggal 30 Maret 2019	156	27/03/2019	27/03/2019	809	27/03/2019								
5	Deputi Polhukam	Izin Seskab	Penyampaian Usulan Nama Delegasi RI untuk Menghadiri Pertemuan ke-11 AANZFTA Joint Committee and Related Meetings, Tanggal 28 April s.d. 3 Mei 2019 di Melbourne, Australia	169	29/03/2019	29/03/2019	849	29/03/2019								
6	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media	348	7/12/19	7/12/19	1633	12/07/2019								
7	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Tindak Lanjut Rencana Pembentukan Badan Peraturan Perundang-undangan (BPUU)	376	7/26/19	7/26/19	1764	26/07/2019								
8	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Konsep Kelembagaan Kantor Kepresidenan	411	8/15/19	8/16/19	1964	16/08/2019								
9	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Catatan mengenai kekhususan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	449	04/09/2019	04/09/2019	2135	04/09/2019								
10	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Laporan Kegiatan dan Permohonan Bantuan Kekurangan Dana Acara Festival Papua Tahun 2019	502	30/09/2019	30/09/2019	2366	30/09/2019								
11	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Penyampaian Data Dukung Izin Pembangunan Gedung Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian	503	30/09/2019	30/09/2019	2372	30/09/2019								
12	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Permohonan Surat Perintah Perbaikan Bangunan Gedung dan Fasilitas Masyarakat Akibat Kerusakan di Wamena Papua	514	07/10/2019	07/10/2019	2434	07/10/2019								
13	Deputi Polhukam	Memo Laporan	Hasil Pemantauan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019	661	30/12/2019	30/12/2019	3281	30/12/2019								
14	Deputi Polhukam	Bahan Rapat	Penyampaian Bahan Substansi Sekretaris Kabinet dalam Menerima Audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Y.M. Joseph R. Donovan Jr. tanggal 8 Januari 2019	9	08/01/2019	08/01/2019	45	08/01/2019								

Tidak Disetujui



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.475.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.2.450.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.500.218.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.1.100.000.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.6.525.218.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

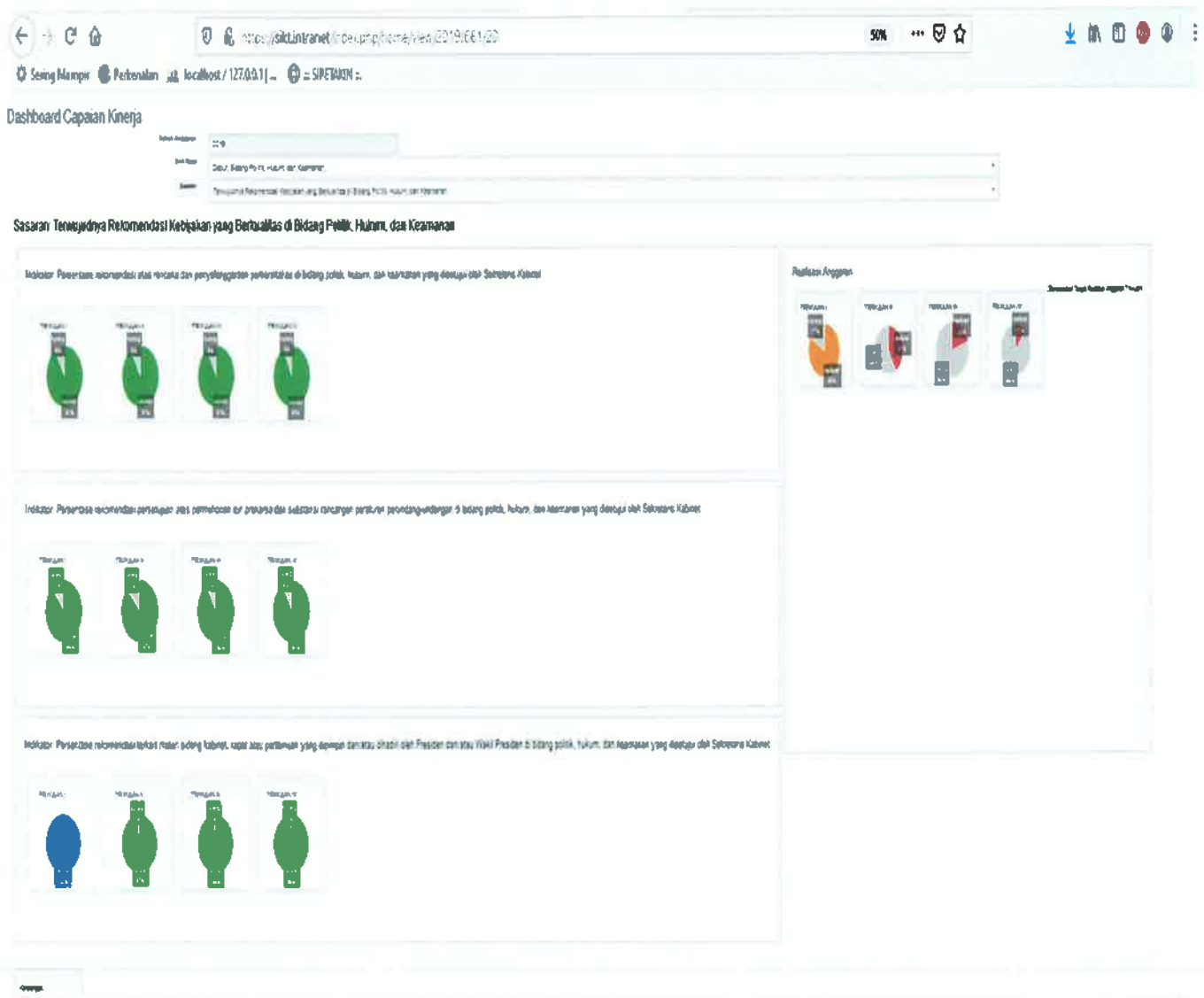
  
Dr. Ir. Pranono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan

  
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.



**Gambar**  
**Dashboard Capaian Kinerja SIKT**  
**Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2019**



Proses penginputan capaian kinerja dalam SIPT dilakukan oleh Bidang Fasilitas Operasional setiap Triwulan, Deputi setiap saat dapat melakukan monitoring capaian kinerja melalui SIPT atau dapat dilaporkan oleh Bidang Fasilitas Operasional secara berkala setiap Triwulan dengan mencetak hasil inputan capaian kinerja tersebut.

Secara ringkas Capaian Kinerja Deputy Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Sasaran: Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

*Indikator: Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.*

Capaian Triwulan I sebesar 91%, Triwulan II sebesar 91%, Triwulan III sebesar 91%, dan Triwulan IV sebesar 92% sehingga untuk Indikator Pertama capaian Deputy Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 adalah sebesar **91,25%**.

*Indikator: Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.*

Capaian Triwulan I sebesar 88%, Triwulan II sebesar 87%, Triwulan III sebesar 90%, dan Triwulan IV sebesar 91% sehingga untuk Indikator Kedua capaian Deputy Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 adalah sebesar **89,00%**.

*Indikator: Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.*

Capaian Triwulan I sebesar 88%, Triwulan II sebesar 87%, Triwulan III sebesar 90%, dan Triwulan IV sebesar 91% sehingga untuk Indikator Ketiga capaian Deputy Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 adalah sebesar **98,50%**.

Terdapat perbedaan data capaian Deputy Bidang Politik Hukum dan Keamanan antara yang terdapat dalam data dengan data yang diinput dalam SIKT (Dashboard) dapat disebabkan oleh data yang diinput ke dalam SIKT baik capaian output dan outcome diinput dengan menggunakan data yang berbeda dengan data yang disiapkan untuk menyusun Laporan ini (ketidacermatan, ketidaktelitian, dan tidak melakukan sinkronisasi dan verifikasi data yang ada) menyebabkan data yang diinput menggunakan data yang belum final sebagaimana data yang digunakan dalam uraian Laporan Kinerja ini.

Demikian pula dengan realisasi anggaran yang terdapat dalam SIKT belum terupdate dan tidak bisa ditarik dari SISKAs (Sistem Informasi Keuangan) sehingga realisasi anggaran masih sangat minim (keci) hanya sekitar 38,75 %.

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per  
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Sesuai Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/Ag/2019 Tgl. 12 Desember 2018

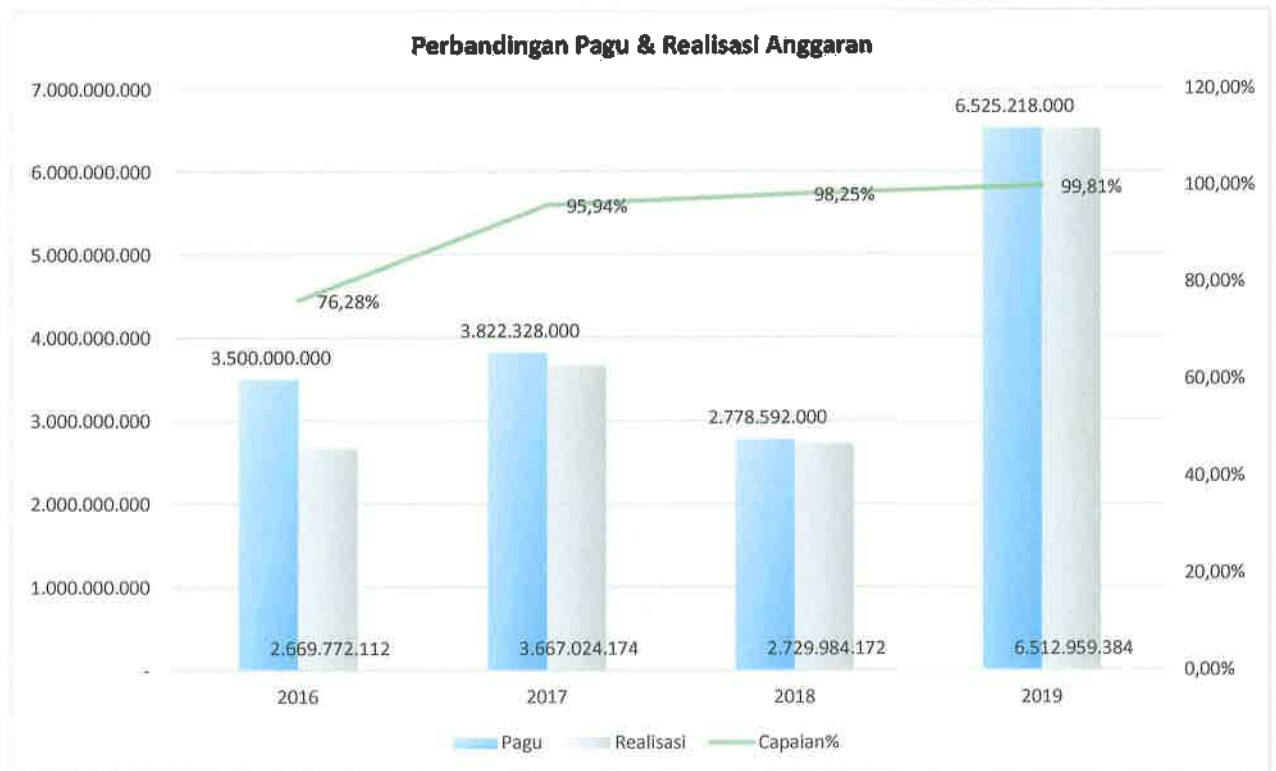
Berdasarkan Kuitansi  
Halaman : 1 dari 1

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	6.525.218.000	6.525.218.000	2.393.200.188	4.119.759.196	6.512.959.384	99,81	12.258.616
0301	ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	6.525.218.000	6.525.218.000	2.393.200.188	4.119.759.196	6.512.959.384	99,81	12.258.616
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	1.475.000.000	1.475.000.000	641.664.538	833.166.864	1.474.831.402	99,98	168.598
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
		1.100.000.000	1.100.000.000	643.077.118	455.378.625	1.098.455.743	99,85	1.544.257



### Perbandingan Pagu & Realisasi Anggaran Deputi Bidang Polhukam

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	3.500.000.000	2.669.772.112	76,28%
2017	3.822.328.000	3.667.024.174	95,94%
2018	2.778.592.000	2.729.984.172	98,25%
2019	6.525.218.000	6.512.959.384	99,81%



## REKAPITULASI SISTEM TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP) KEDEPUTIAN POLHUKAM

NO	KEGIATAN	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT		STATUS				KETERANGAN	
			SETKAB	K/L	HIJAU	KUNING	MERAH	ABU-ABU		
<b>2019</b>										
1	SIDANG KABINET PARIPURNA 07 Januari 2019	Program dan Kegiatan Tahun 2019	6	5	4	1	1	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 6 Kegiatan dan 5 Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 4 Berwarna Hijau dan 1 Berwarna Kuning dan 1 Berwarna Merah; Arahan Beririsan Dengan Deputi Perekonomian dan Deputi PMK, dan Deputi Maritim	
2	SIDANG KABINET PARIPURNA 06 Maret 2019	1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 2. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020	8	8	8	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 8 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 8 Berwarna Hijau; Arahan Beririsan Dengan Deputi Perekonomian dan Deputi PMK, dan Deputi Maritim	
3	SIDANG KABINET PARIPURNA 23 April 2019	Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020	1	1	1	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 1 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 1 Berwarna Hijau; Arahan Beririsan Dengan Deputi Perekonomian	
4	RAPAT TERBATAS 03 Mei 2019	Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019 M	5	5	5	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 1 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 1 Berwarna Hijau; Arahan Beririsan Dengan Deputi Perekonomian, Deputi Maritim, Deputi PMK	
5	RAPAT TERBATAS 19 Juni 2019	Persiapan Kunjungan Kerja Presiden ke KTT ASEAN dan KTT G-20	1	1	1	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 1 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 1 Berwarna Hijau	
6	SIDANG KABINET	Arahan Presiden dan Pemaparan Menteri PPN/Kepala Bappenas	10	10	9	1	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 10 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 9 Berwarna Hijau, 1	

NO	KEGIATAN	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT		STATUS				KETERANGAN
			SETKAB	K/L	HIJAU	KUNING	MERAH	ABU-ABU	
	PARIPURNA 08 Juli 2019								Berwarna Kuning; Arahan Berisikan Dengan Deputi Perekonomian, Deputi Maritim, Deputi PMK
7	SIDANG KABINET PARIPURNA 05 Agustus 2019	Rancangan Undang-Undang beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020	7	7	6	1	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 7 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 6 Berwarna Hijau, 1 Berwarna Kuning; Arahan Berisikan Dengan Deputi Perekonomian, Deputi Maritim, Deputi PMK
8	RAPAT TERBATAS 16 September 2019	Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	3	3	3	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 3 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 3 Berwarna Hijau
9	RAPAT TERBATAS 31 Oktober 2019	Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	5	-	-	-	-	-	SETKAB telah mengisi 5 Kegiatan dan Belum Ada Laporan Tindak Lanjut Dari K/L;
10	SIDANG KABINET PARIPURNA 14 November 2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	1	1	1	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 1 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 1 Berwarna Hijau; Arahan Berisikan Dengan Deputi Perekonomian, Deputi Maritim, Deputi PMK
11	RAPAT TERBATAS 22 November 2019	Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)	2	2	-	-	2	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 2 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 2 Berwarna Merah



NO	KEGIATAN	POKOK BAHASAN	TINDAK LANJUT		STATUS				KETERANGAN
			SETKAB	K/L	HIJAU	KUNING	MERAH	ABU-ABU	
12	RAPAT TERBATAS 10 Desember 2019	Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	14	-	-	-	-	-	SETKAB telah mengisi 14 Kegiatan dan Belum Ada Laporan Tindak Lanjut Dari K/L;
13	RAPAT TERBATAS 11 Desember 2019	Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	-	-	-	-	-	Belum ada kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut dari SETKAB dan K/L
14	RAPAT TERBATAS 16 Desember 2019	Persiapan Pemindahan Ibu Kota	3	3	3	-	-	-	SETKAB dan K/L telah mengisi 3 Kegiatan dan Laporan Tindak Lanjut; Kegiatan dan Tindak Lanjut 2 Berwarna Hijau; Arahan Beririsan Dengan Deputi Perekonomian

Keterangan:

Jumlah Arahan 2019 : 14

Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut oleh SETKAB : 66

Jumlah Laporan Tindak Lanjut oleh K/L : 46

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN  
TAHUN 2019**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah menyajikan profil (hal 1)</li> <li>✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal iii)</li> <li>✓ Capaian kinerja (hal 17)</li> <li>✓ Lampiran telah mendukung (hal lampiran)</li> <li>✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 36)</li> <li>✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 40)</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dikerjakan PIC asdep</li> <li>✓ Data LKj telah memadai</li> </ul> <p>(Belum ada mekanisme)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data yang disajikan valid</li> </ul>
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah sesuai dengan PK (hal 13)</li> <li>✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 12)</li> <li>✓ Telah selaras (hal 12)</li> <li>✓ Telah sesuai (hal 14)</li> <li>✓ Telah sesuai sasaran &amp; indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 13)</li> <li>✓ Telah memadai (hal 13)</li> <li>✓ Perbandingan kerja 5 tahun (hal 20)</li> </ul>